

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di  
Kabupaten Manokwari)**

**Anik Wuriasih \*)**

***Abstract***

*This study aims to examine the influence of several factors (human resources quality, information technology utilization, internal control systems and organizational commitments) on the quality of the financial information of local government in Manokwari. Type of data uses in this research is primary data which have been obtained from questionnaires which are directly distributed to the respondents who are the head and the staffs of accounting division on financial and asset management services area (BPKAD) of Manokwari. The number of population and study sample was 46 people. Sampling using sampling methods saturated. This research data analysis method is multiple linear regression. Results of this study can be conclude that the human resources quality, internal control systems and organizational commitments have a significant positive effect on the quality of local government financial reporting information, while the use of information technology utilization does not have an effect on the quality of local government financial reporting information. Suggestion for the further research is to expand the independent variables that affect the quality of the financial information of local government.*

***Keywords:*** *Human Resources Quality, Information Technology Utilization, Internal Control Systems, Organizational Commitment, Quality of the Financial Information of Local Government*

**Pendahuluan**

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus diwujudkan secara transparan dan akuntabel,

*\*) Staff pengajar Universitas Papua*

sehingga pengembangan daerah dapat dilakukan dengan mengatur dan mengurus pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang selanjutnya direvisi menjadi UU No. 9 Tahun 2015 yang merupakan pembagian tugas dan wewenang pemerintah daerah, juga UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadi dasar hukum bagi BPK dalam bertanggungjawab melaksanakan tugasnya untuk memeriksa transparansi dan akuntabilitas sebuah laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih atau *good governance*. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang disusun menjadi dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setelah itu LKPD diserahkan kepada BPK untuk diaudit sehingga menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dipublikasikan untuk masyarakat luas. Sehingga laporan keuangan publikasian yang telah diaudit dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan memberikan manfaat umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

Warisno (2009), menyatakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki kualitas sumberdaya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

Dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Dalam Sawyer (2005), adapun pernyataan *Commitee Of Sponsoring Organizations* (COSO) bahwa struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri atas lima komponen, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran resiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, serta (5) pemantauan.

Ramadhan (2015), menyatakan komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP. Komitmen organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan organisasi secara aktif karena karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja.

Untuk itu dalam pencapaian kualitas laporan keuangan dibutuhkan informasi yang relevan dan andal, karena informasi tersebut akan digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Kualitas akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan LKPD. Pemeriksaan atas komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini dari BPK tersebut dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menghasilkan laporan wajar dan berkualitas sedangkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu perubahan yang sedikit dan harus dilakukan perbaikan, adapun opini tidak wajar (TW) bahwa laporan diragukan kebenarannya, dan (TMP) tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari terkait LKPD Tahun Anggaran (TA) 2014 maka BPK-RI memberikan opini *Disclaimer*. Hal ini dikarenakan bahwa hampir sebagian besar SKPD belum bisa melakukan pendataan asset. Nilai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang belum terinventarisir sebesar Rp. 2,4 triliun. Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari bukannya tidak mampu memperbaiki opini laporan keuangan, tetapi karena adanya kesalahan dengan SKPD yang tidak membantu upaya tersebut dengan tidak memberikan data secara lengkap sehingga semua tidak berjalan dengan baik. Pada TA 2015 Kabupaten Manokwari mendapat opini WDP dan untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menyerahkan LKPD kepada BPK tepat waktu. Ada sejumlah permasalahan yang ditemukan saat pemeriksaan LKPD, terutama masalah asset. Penataan aset tetap harus diperbaiki oleh

Pemerintah Daerah. Selain asset, juga ada masalah dalam pengelolaan kas, serta saldo kas yang belum dikembalikan atau dipertanggungjawabkan, serta utang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan. Masih ditemukan sejumlah masalah, seperti pelaporan dana bansos (bantuan sosial) yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima, dan jumlahnya masih signifikan yang belum dipertanggungjawabkan di atas 20 persen. Pada tahun 2016 hingga 2017 BPK masih memberikan opini WDP atas LHP LKPD Kabupaten Manokwari. Masalah utama yang dihadapi LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari masih tetap sama yaitu pada masalah asset. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari masih harus perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Permasalahan umum dalam penyajian laporan keuangan yang kurang maksimal dan transparan pada kinerja pemerintah membuat laporan tidak menjadi berkualitas dan dapat dipastikan akan mengalami *disclaimer*. Upaya untuk menghadapi hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan secara terus menerus serta pengelolaan secara profesional. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan, tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, antara lain: Artana (2016) menyebutkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh, tetapi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula Mauliana (2016) membuktikan bahwa kualitas SDM dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Shintia dan Erawati (2017), membuktikan bahwa kualitas SDM, sistem informasi, pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Penelitian Siahaan (2017), menyatakan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan. Juga Triyanto (2017), menyimpulkan bahwa kompetensi SDM dan peran inspektorat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dari beberapa *research gap* dari penelitian terdahulu dan juga kondisi LHP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang sampai dengan TA 2017 masih

mendapatkan opini WDP dari BPK maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Manokwari.

## **Telaah Pustaka**

### *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

### *Kualitas Laporan Keuangan*

PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap.

#### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### *Kualitas Sumberdaya Manusia*

Tjiptoherijanto (2001), untuk menilai kapasitas dan kualitas SDM dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kualitas sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

#### *Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah*

PP No. 56 Tahun 2005 tentang SIKD menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah

data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

#### *Sistem Pengendalian Internal*

PP No. 66 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 66 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

#### *Komitmen Organisasi*

Menurut Griffin (2004), komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Zurnali (2010), mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut yaitu komitmen afektif, komitmen kontinyu, komitmen normatif.

#### *Kerangka Pemikiran*

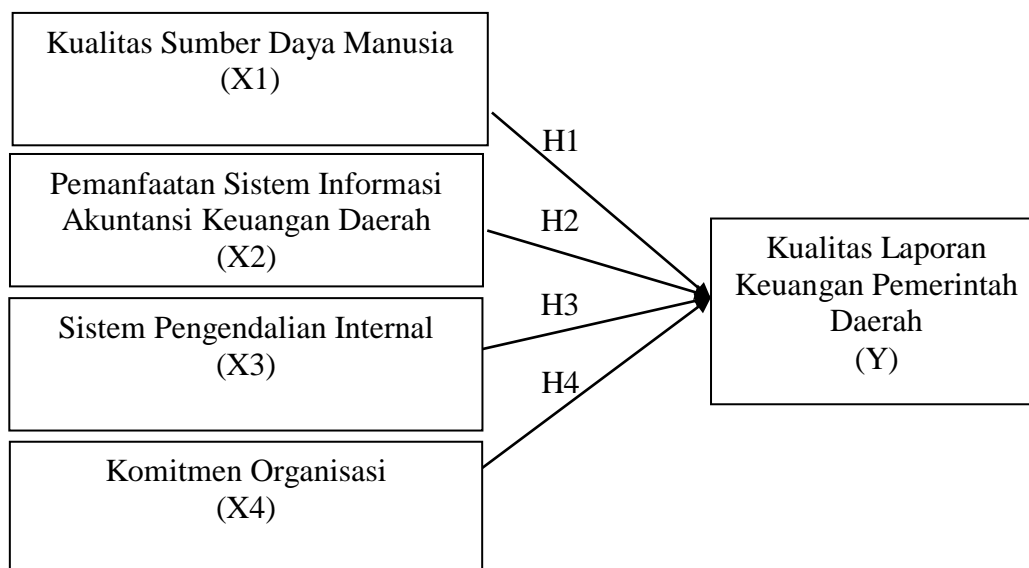
Pada TA 2014-2016 terdapat temuan terkait pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Manokwari seperti belum bisa melakukan pendataan aset, masalah dalam pengelolaan kas, serta saldo kas yang belum dikembalikan atau dipertanggung jawabkan, utang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelaporan dana bansos yang belum dipertanggung-jawabkan oleh penerima, Permasalahan tersebut dapat terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, untuk itu perlunya kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai PP No 71 tahun 2010.

Adapun kerangka pemikiran pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari secara sistematis dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

**Gambar 1**

**Kerangka Pemikiran Teoritis**



**Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian Ini (2018)**

**Hipotesis**

- H1: Kualitas Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H2: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H4: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

**Metodologi**

Variabel terikat (Y) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari. Variabel bebas (X) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari, seperti faktor: kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.



Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dan seluruh staff bagian akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari yang berjumlah 46 orang. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara sampel jenuh karena kepala dan seluruh staf bagian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Manokwari dijadikan sampel.

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi linier berganda, yaitu suatu variabel dependen Y (variabel terikat) dapat saja dihubungkan dengan dua atau lebih dari variabel independen X (variabel bebas). Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_4 X_4 + e$$

- Di mana : Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  
 $a_0$  = Nilai *intercept* (konstanta)  
 $a_1 \dots a_4$  = Koefisien arah regresi  
 $e$  = Error  
(X1) = Kualitas sumberdaya manusia  
(X2) = Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah  
(X3) = Sistem pengendalian internal  
(X4) = Komitmen organisasi

## Pembahasan

### *Uji Validitas*

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *bivariate correlation*. Apabila nilai signifikan < 0,05 berarti kuesioner tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel		Nilai Korelasi	Sig	Keterangan
Kualitas SDM (X1)	P1	0,808	0,000	<i>Valid</i>
	P2	0,428	0,003	<i>Valid</i>
	P3	0,790	0,000	<i>Valid</i>
	P4	0,748	0,000	<i>Valid</i>
	P5	0,822	0,000	<i>Valid</i>
	P6	0,620	0,000	<i>Valid</i>

Variabel		Nilai Korelasi	Sig	Keterangan
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2)	P1	0,627	0,000	Valid
	P2	0,789	0,000	Valid
	P3	0,671	0,000	Valid
	P4	0,620	0,000	Valid
	P5	0,688	0,000	Valid
	P6	0,471	0,001	Valid
	P7	0,681	0,000	Valid
	P8	0,399	0,006	Valid
Sistem pengendalian internal (X3)	P1	0,662	0,000	Valid
	P2	0,690	0,000	Valid
	P3	0,684	0,000	Valid
	P4	0,762	0,000	Valid
	P5	0,672	0,000	Valid
	P6	0,714	0,000	Valid
	P7	0,604	0,000	Valid
	P8	0,476	0,001	Valid
	P9	0,597	0,000	Valid
	P10	0,414	0,004	Valid
Komitmen organisasi (X4)	P1	0,675	0,000	Valid
	P2	0,442	0,002	Valid
	P3	0,672	0,000	Valid
	P4	0,489	0,001	Valid
	P5	0,626	0,000	Valid
Kualitas laporan keuangan (Y)	P1	0,733	0,000	Valid
	P2	0,718	0,000	Valid
	P3	0,668	0,000	Valid
	P4	0,645	0,000	Valid
	P5	0,640	0,000	Valid
	P6	0,549	0,000	Valid
	P7	0,634	0,000	Valid
	P8	0,351	0,017	Valid
	P9	0,526	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan pada setiap variabel penelitian adalah valid atau dapat dikatakan sah karena nilai signifikan  $< 0,05$ .

### *Uji Reliabilitas*

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Kuesioner yang reliabel akan menghasilkan data yang benar atau data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Guilford (1956), koefisien reliabilitas dikategorikan:

1.  $0,80 < 1,00$  maka reliabilitas sangat tinggi
2.  $0,60 < 0,80$  maka reliabilitas tinggi
3.  $0,40 < 0,60$  maka reliabilitas sedang
4.  $0,20 < 0,40$  maka reliabilitas rendah
5.  $-1,00 < 0,20$  maka reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel)

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kualitas SDM (X1)	0,781	<i>Reliabel Tinggi</i>
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2)	0,777	<i>Reliabel Tinggi</i>
Sistem pengendalian intern (X3)	0,831	<i>Reliabel Sangat Tinggi</i>
Komitmen organisasi (X4)	0,518	<i>Reliabel Sedang</i>
Kualitas laporan keuangan (Y)	0,777	<i>Reliabel Tinggi</i>

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel adalah reliabel.

### *Analisis Statistik Deskriptif*

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum dan maksimum (Ghozali, 2011).

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

### **Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SDM	46	19	30	25,74	2,847	8,108
SIKAD	46	17	40	33,35	4,682	21,921
SPI	46	29	50	40,72	5,427	29,452
KO	46	15	25	20,91	2,598	6,748
KLK	46	25	45	37,35	4,073	16,587
Valid N (listwise)	46					

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel Kualitas SDM memiliki nilai terendah sebesar 19,00 dan nilai tertinggi sebesar 30,00 dengan rata-rata sebesar 25,74 dan standar deviasi sebesar 2,847 dan variansnya sebesar 8,108. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai terendah sebesar 17,00 dan nilai tertinggi sebesar 40,00 dengan rata-rata sebesar 33,35 dan standar deviasi sebesar 4,682 dan variansnya sebesar 21,921. Variabel SPI memiliki nilai terendah sebesar 29,00 dan nilai tertinggi sebesar 50,00 dengan rata-rata sebesar 40,72 dan standar deviasi sebesar 5,427 dan variansnya sebesar 29,452. Variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai terendah sebesar 15,00 dan nilai tertinggi sebesar 25,00 dengan rata-rata sebesar 20,91 dan standar deviasi sebesar 2,598 dan variansnya sebesar 6,748. Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki

nilai terendah sebesar 25,00 dan nilai tertinggi sebesar 45,00 dengan rata-rata sebesar 37,35 dan standar deviasi sebesar 4,073 dan variansnya sebesar 16,587.

## Uji Asumsi Klasik

### *Uji Normalitas*

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov Test*. Residual terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,37126987
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,072
	Negative	-,100
Kolmogrov-Smirnov Z		,679
Asymp. Sig. (2-tailed)		,747

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov Test* adalah 0,679 pada signifikansi sebesar 0,747 yang berarti  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

### *Uji Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinearitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Jika  $VIF < 10$  dan nilai tolerance  $> 0,10$  maka tidak

terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SDM	,844	1,184
SIAKD	,787	1,271
SPI	,740	1,352
KO	,690	1,450

a. Dependent Variable: KKK

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* >0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel independen memiliki VIF < 10. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### *Uji Heteroskedastisitas*

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Gletser*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
SDM	0,746	<i>Homokedastisitas</i>
SIAKD	0,940	<i>Homokedastisitas</i>
SPI	0,167	<i>Homokedastisitas</i>
KO	0,441	<i>Homokedastisitas</i>

Berdasarkan tabel 6 uji *Gletser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi kualitas SDM sebesar 0,746, nilai signifikansi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0,940, nilai signifikansi SPI sebesar 0,167, dan nilai signifikansi komitmen

organisasi sebesar 0,441. Jadi, dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi berganda karena nilai signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05.

### *Analisis Regresi Berganda*

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,598	4,245		,847	,402
SDM	,338	,142	,236	2,389	,022
SIAKD	-,024	,089	-,027	-,264	,793
SPI	,393	,079	,524	4,958	,000
KO	,469	,172	,299	2,733	,009

a. Dependent Variable: KLK

Dari tabel 7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,598 + 0,338X_1 - 0,024X_2 + 0,393X_3 + 0,469X_4 + e$$

Bentuk persamaan diatas memberikan gambaran bahwa:

1. Konstanta sebesar 3,598 menyatakan bahwa variabel bebas dianggap konstan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari adalah 3,598.
2. Kualitas SDM (X1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,388, yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap variabel kualitas SDM maka kualitas terhadap laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,388.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,024, yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas terhadap laporan keuangan akan berkurang sebesar 0,024.

4. SPI (X3) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,393, yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap variabel SPI maka kualitas terhadap laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,393.
5. Komitmen Organisasi mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,469, yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap variabel komitmen organisasi maka kualitas terhadap laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,469.

## Uji Hipotesis

### *Uji Model (Uji F)*

Uji model dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  dan  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  dan  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Hasil uji model dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Model (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	493,403	4	123,351	19,987	,000 <sup>b</sup>
Residual	253,031	41	6,171		
Total	746,435	45			

a. Dependent Variable: KLIK

b. Predictors: (Constant), KO, SDM, SIAKD, SPI

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui  $F \text{ hitung}$  sebesar 19,987 lebih besar dari  $F \text{ tabel}$  sebesar 2,60 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan secara simultan variabel kualitas SDM, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, SPI, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### *Uji Parsial (Uji t)*

Uji parsial dilakukan dengan tujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel dependen

(Ghozali, 2013). Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam uji t, sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  dan  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1, H_2, H_3, H_4$  diterima
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  dan  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1, H_2, H_3, H_4$  ditolak

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	,847	,402
SDM	2,389	,022
SIAKD	-,264	,793
SPI	4,958	,000
KO	2,733	,009

a. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk setiap variabel independen sebagai berikut:

- a. Variabel kualitas SDM mempunyai nilai t hitung sebesar  $2,389 > t \text{ tabel}$  sebesar  $2,019$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai t hitung sebesar  $-0,264 < t \text{ tabel}$  sebesar  $2,019$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,793 > 0,05$  maka  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Variabel SPI mempunyai nilai t hitung sebesar  $4,958 > t \text{ tabel}$  sebesar  $2,019$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai t hitung sebesar  $2,733 > t \text{ tabel}$  sebesar  $2,019$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$  maka  $H_4$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.



### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,813 <sup>a</sup>	,661	,628	2,484

a. Predictors: (Constant), KO, SDM, SIAKD, SPI

b. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa *R square* sebesar 0,661 yang artinya bahwa sebesar 66,1% variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu kualitas SDM, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, SPI, dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya sebesar 33,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pembahasan

#### *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM mempunyai nilai t hitung sebesar 2,389 > t tabel sebesar 2,019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 maka Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Ini berarti semakin tinggi kualitas SDM maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori *agency* yang menjelaskan bahwa adanya hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak antara rakyat (*principal*) dengan pemerintah (*agent*) sehingga pemerintah harus memiliki kualitas SDM dalam memenuhi wewenang yang diberikan rakyat untuk bertanggung jawab mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sesuai dalam penelitian ini SDM yang berkualitas memiliki kualifikasi yang cukup dengan penguasaan dan

pengembangan keahlian yang dimiliki dari pelatihan-pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyajikan segala aktivitas pemerintah seperti dengan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adhi dan Suharjo (2013), menyatakan bahwa pegawai yang memahami dan memiliki kompetensi dibidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh Pemerintah agar mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut perlu mengikuti bimbingan teknis, *workshop*, pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai keuangan pemerintahan secara rutin dan tekun. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai praktik pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauliana (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Adhi dan Suharjo (2013), Maksyur (2015), Mutiana dkk (2017), serta Shintia dan Erawati (2017), yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai t hitung sebesar  $-0,264 < t$  tabel sebesar 2,019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,793 > 0,05$  maka Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditolak. Ini berarti pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori *agency* yang menyatakan bahwa hubungan antara prinsipal dengan agendapat menimbulkan informasi asimetris yakni agen memiliki informasi lebih banyak mengenai laporan keuangan pemerintah dan kurangnya informasi yang diketahui oleh rakyat, sehingga dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen. Dalam hal ini, kurangnya keterlibatan pemerintah untuk memanfaatkan sistem informasi akuntansi seperti tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan tidak melakukan pencatatan transaksi dengan baik serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, akan

mengakibatkan terjadinya masalah dalam memperoleh informasi yang tidak akurat untuk pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi sektor publik. Sehingga pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang kurang baik akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Artana (2016) yang menyatakan bahwa walaupun semakin modern dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan teknologi sistem informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah para pegawai dalam menyusun laporan keuangan belum tentu akan membuat kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Diani (2014), dan Artana (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2010), Sari dkk (2014), Mauliana (2016), Shintia dan Erawati (2017), yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Pada tabel 9 variabel SPI mempunyai nilai t hitung sebesar  $4,958 > t$  tabel sebesar 2,019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka Hipotesis<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Ini berarti semakin tinggi SPI maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan teori *agency*, dimana hubungan antara principal dan agen memerlukan *corporate governace* atau sistem pengawasan untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul dari informasi asimetris. Dalam hal ini, pemerintah daerah membutuhkan SPI untuk mengendalikan segala kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern dalam PP No. 66 Tahun 2008, sehingga apabila SPI dilakukan dengan baik dalam kegiatan pengendalian akuntansi organisasi akan menyebabkan semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Menurut Udiyanti dkk (2014), sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Sistem

pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti dkk (2014), Ramadhan (2015), Maksyur (2015), Munasyir (2015), Artana (2016), Kesuma dkk (2017), Mutiana dkk (2017), Shintia dan Erawati (2017), Triyanto (2017), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### *Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai t hitung sebesar 2,733 > t tabel sebesar 2,019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 maka Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuanganditerima. Ini berarti jika komitmen organisasi semakin tinggi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat pula. Hal ini sesuai dengan teori *agency*, yang menyatakan bahwa prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sehingga prinsipal memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, komitmen organisasi yang tinggi dikarenakan anggota individu memiliki kesesuaian tujuan dengan organisasi yang hanya mementingkan kepentingan organisasi untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat dalam hal pembangunan ekonomi seperti dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas untuk digunakan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga rakyat dapat melihat pertanggungjawaban terhadap wewenang yang diberikan kepada pemerintah dilakukan secara akuntabilitas. Komitmen organisasi yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.

Pada penelitian Maksyur (2015), di dalam lingkungan pemerintah daerah, pegawai atau aparat yang memiliki komitmen sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan yang baik dan andal. Selain itu, lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam penyajian laporan keuangannya akan selalu berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

serta memiliki informasi yang berkualitas. Jadi jika komitmen suatu organisasi baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan andal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015), Ramadhan (2015), Mutiana dkk (2017), Shintia dan Erawati (2017), Siahaan (2017), yang menyatakan bahwakomitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Simpulan dan Saran**

### *Simpulan*

1. Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas SDM pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari memiliki latar belakang pendidikan yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan, serta memiliki keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kecepatan untuk mengakses dan mengolah data, mempertinggi keamanan, meningkatkan efisiensi biaya, dan meningkatkan kinerja pemerintah sehingga belum memenuhi tanggungjawab dalam mewujudkan informasi yang akurat dan relevan. Kurangnya transparansi serta akutabilitas pemerintah menimbulkan kurang handalnya informasi yang disajikan dan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari, agar mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai yang diharapkan.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPI pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari memiliki lingkungan pengendalian yang baik dan telah menerapkan penilaian resiko dalam organisasi, meningkatkan kegiatan pengendalian, menerapkan informasi dan komunikasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas juga telah meningkatkan pemantauan

pengendalian intern. Oleh karena itu, SPI pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

4. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen Organisasi pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari mempunyai pegawai yang memiliki komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, komitmen organisasi pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

### *Saran*

Saran yang dapat diberikan bagi BPKAD Kabupaten Manokwari, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan mempertahankan tingkat kualitas sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada transparansi dan akuntabilitas terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.

### **Daftar Pustaka**

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 3, 3 Oktober 2013 Jurnal STIE Semarang. Semarang.
- Artana, Sari, Arlia. 2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah DKI Jakarta)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, Jakarta.
- Diani, Dian Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, Hal 1-23.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Grafindo Persada.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Griffin, R.W. 2004. *Management, 7th edition*. Massachusetts: Houghton Mifflin Company.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. *Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost & Ownership Structure. Journal of Financial Economics*. Oktober. Vol. 3, No. 4: 305-306.
- Kesuma, P. K. Choirul Anwar, Darmansyah. 2017. Pengaruh *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*, Vol. 1. No. 2, Desember.
- Maksyur, V. Noprial. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, Oktober.
- Mauliana, Risa. 2016. **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)**. Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Munasyir. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, No. 4, November.
- Mutiana, L., Yossi Diantimala, Zuraida. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2, September.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Ramadhan, S. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Sari, Maeka, M.Y.P.N., I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 1.

Sawyer, Lawrence. B. 2005. *Sawyers Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Shintia, Prami, A.I.C., Ni Made Adi Erawati. 2017. Pengaruh Kualitas Sdm, Sistem Informasi, Pengendalian *Intern* Dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.2. November.

Siahaan, Andika. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 23.

Triyanto, Haerul. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Udiyanti, A.L.N., Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Buleleng). *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 *tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 *tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Warisno. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.* Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan.

Yuliani, Safrida., Nadirsyah, Usman Bakar. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3. No. 2. Juli.

[www.bpk.go.id/ihs](http://www.bpk.go.id/ihs) artikel diakses tanggal 5 februari 2018.